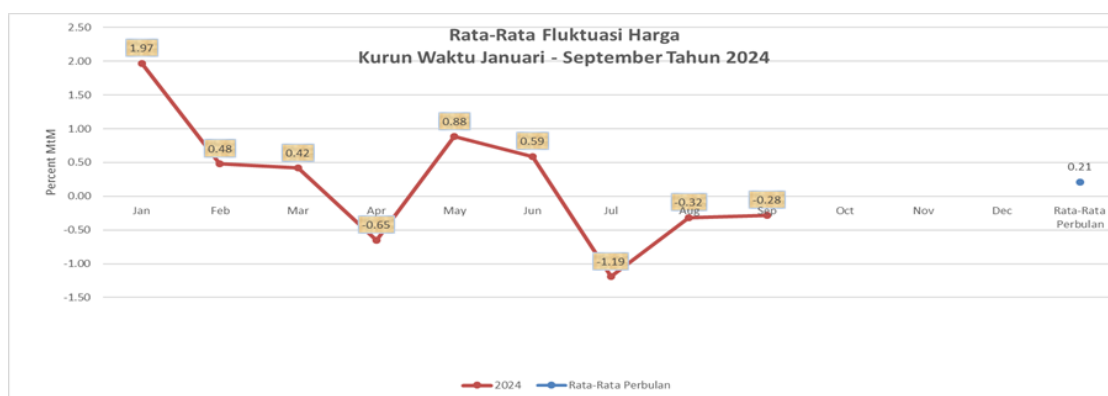


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah yang melakukan pemantauan dan perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga komoditas pangan yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas dapat melakukan pemantauan perkembangan Harga dan Stok dalam kurun waktu rerata per-triwulanan. Berikut ini adalah 22 komoditas pangan (*volatile foods*) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipantau, diantaranya : Beras, Kedelai, Cabe, Bawang Merah, Bawang Putih, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur, Ikan Teri, Susu Kental Manis, Garam Halus, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Mie Instant, Bawang Bombay, Tahu, Tempe, Pisang Ambon, dan Jeruk Kalimantan.

Informasi Perkembangan Harga *Volatile Foods* (VF) dapat dilihat pada perkembangan *Month to Month* sebesar (-0,28), *Year to Date* (Ytd) hingga Triwulan III Tahun 2024 adalah dan angka fluktuasi rata-rata fluktuasi 0,21%. Jika target Fluktuasi Tahunan sebesar 0,53%, maka angka rerata ini lebih **Rendah** dari target fluktuasi sebesar (**0,32%**). Namun perkembangan harga yang terjadi masih berada di bawah rentang target (0,53%). Berikut merupakan grafik IPH 22 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) yang dipantau di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni:



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Letak Geografis

Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan dengan cakupan $\pm 98\%$ terdiri dari perairan dan hanya $\pm 2\%$ daratan, terdiri dari 255 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data moda transportasi laut yang berlayar di perairan Anambas dari Instansi Syahbandar Tarempa tahun lalu, Kepulauan Anambas masih melakukan distribusi logistik dari daerah/kota luar ($\pm 90\%$ dari kabupaten/kota terdekat).

Anambas bukan merupakan daerah surplus bahan pokok dan barang penting, khususnya pada komoditas kebutuhan-kebutuhan pokok (sembako). Pada sektor ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan masih menemukan kendala aktual di lapangan, minat masyarakat Anambas akan bertani dan bercocok tanam dinilai sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari perspektif sosial budaya yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Anambas bermukim dan tinggal di

daerah pesisir dan sebagian besar masyarakat Anambas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi cuaca ekstrim juga memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi pertanian lokal.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang distribusi masih tergolong belum memadai, hal ini disebabkan karena sistem bongkar muat barang (*dwellling time*) terbesar di Pusat Kota Tarempa masih belum terurai dengan baik. Pada Kondisi-kondisi tertentu seperti cuaca buruk, masalah teknis dan keterlambatan kapal dapat berpotensi memberikan efek domino pada aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Waktu tunggu aktifitas bongkar muat rata-rata memakan waktu mencapai 14 hari kalender. Penyebab utama lamanya waktu bongkar muat ini disebabkan karena:

1. Keterbatasan Tenaga kerja Bongkar Muat;
 2. Di Lokasi Pelabuhan Tarempa masih belum memiliki sarana pergudangan;
 3. Jalur Distribusi dalam kota yang sangat sempit dan memakan waktu lama untuk bongkar muat dengan volume sekitar 1m³ (menggunakan moda transportasi kendaraan Roda 3);
 4. Belum dimanfaatkannya Gudang logistik sebagai sarana untuk memperlancar distribusi; dan
 5. Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Teluk Ret.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Optimalisasi -ProgramProgram Unggulan dan Pelaksanaan Tugas TPID Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Tema “Gerakan Menanam Aneka Hortikultura Anambas (GEMAH ANAMBAS TAHUN 2024), diantaranya :

1. “Sosialisasi Beragam bergizi Seimbang dan Aman”

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pagu Anggaran Rp 91.810.300. Dalam kegiatan ini merupakan tahap penyediaan bibit yang melibatkan BPP Wilayah Kecamatan Siantan Selatan dan BPP Wilayah Palmatak.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan Pembibitan oleh Pihak BPP yang kemudian bibit di bagikan ke Masyarakat dengan jumlah lebih kurang 200-300 bibit cabe bibit Terong dan bibit Pepaya Calivornia. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Palmatak Tanggal 18 Agustus 2024 dan dilaksanakan di Kecamatan Siantan pada tanggal 20 Agustus 2024.

2. **Sosialisasi Menanam di pekarangan dan Pembagian Bibit di SMA 1 Palmatak**
3. **Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang di 3 titik Pasar Tradisional, dan Pelabuhan Bongkar Muat Tarempa oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan KKA.**
4. **“Program Pemanfaatan Pekarangan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau”**

Program Pembangunan Rumah Hidroponik. Pagu Anggaran sebesar Rp 137.291.235. dialokasikan untuk 3 KWT yang berada di Kecamatan Siantan yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Kerapu Tiger di Desa Tarempa Timur, KWT Kreatif Mandiri di Desa Tarempa Selatan dan KWT Cemara di Desa Tarempa Timur.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

9 Upaya yang menjadi bahan evaluasi kebijakan PID di Kabupaten Kepulauan Anambas pada TW III Tahun 2024, diantaranya:

1. Mengoptimalkan program kegiatan yang sedang berlanjut (program Gerakan menanam di pekarangan) dan Pelaksanaan Pembagian Benih dan Perlengkapan menanam.
2. Perlunya sosialisasi dan kegiatan pembagian bibit lanjutan ke lebih banyak sekolah.
3. Perlunya pendampingan dan penyuluhan berkelanjutan oleh Dinas pada bidang terkait.
4. Melakukan Koordinasi Pantauan Harga dan stok di 8 Distributor yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Perlunya program ekstensifikasi pangan yang lebih ramah biaya produksi
6. Sinkronisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah KKA untuk rencana Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah / Operasi Pasar Murah secara kolektif di 3 Kecamatan Besar di Anambas.
7. Optimalisasi Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok di Pasar agar Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah preventif sehingga kenaikan Harga dan Kelangkaan Barang di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat ditekan pada titik stabil (**Terjaganya Fluktuasi Kab. Kep. Anambas 0,53%). Target Inflasi Nasional 2,5% \pm 1.**
8. Pemantauan Harga dan Stok dan Pengumpulan informasi stabilitas harga dan ketahanan pangan, untuk dilaporkan ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Provinsi. Melakukan *data updating* pada laman SP2KP.
9. Perencanaan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di IV Tahun 2024.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 277 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 513 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 514 Tahun 2022 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah yang disusun dalam 4 kunci strategis (*4 Key Strategies*) yaitu :

1. Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Stok

TPID tetap berupaya melakukan analisa terhadap adanya potensi tekanan harga dan stok barang melalui aktifitas pemantauan harga dan stok barang beredar serta memastikan ketersediaan barang dan tidak terjadinya kelangkaan komoditas menjelang penghujung akhir tahun 2024 di Kepulauan Anambas.

2. Ketersediaan Pasokan/Produk

TPID secara konsisten tetap mendorong dan mengawal program-program non-moneter seperti menaikkan hasil produksi komoditas pangan lokal di daerah agar dapat mencukupi kuota kebutuhan lokal dan melakukan pengawasan harga dan distribusi barang beredar secara berkelanjutan.

Kelancaran Distribusi

TPID secara berkesinambungan tetap mengawal program **“Peningkatan Sistem Logistik secara Terintegrasi pengalihan lokus Pelabuhan ke Area Logistik Teluk Ret”**.

Pengalihan dilakukan secara parsial dengan penggunaan logistik dan pemanfaatan sisi Pelabuhan Teluk Ret untuk transportasi antar pulau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif dengan penyertaan modal dana desa, pendampingan pelatihan pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi serta mendorong perencanaan bantuan stimulus fiskal untuk BUMDES yang dinilai berhasil dan layak dalam operasional BUMDES.

4. Komunikasi Efektif

TPID melaksanakan fungsi koordinatif melalui Bagian Perekonomian SDA dan Inpektorat Daerah untuk mendapatkan seluruh data dukung dan informasi kegiatan/program yang berkaitan dengan TPID. Seluruh data dan informasi harus dikoordinir dan dituangkan dalam suatu Laporan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan arahan Kemendagri tentang Tim Penanganan Inflasi Daerah.